

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan, Jepang sudah sejak dulu menganut pasifisme, dan mengklaim dirinya sebagai negara pasifis. Identitas pasifisme Jepang merupakan bagian krusial dari identitas nasional Jepang. Pasca Perang Dunia II, Jepang mengadopsi konstitusi yang menetapkan bahwa negara tersebut menolak untuk mempertahankan militer sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Jepang mengadopsi dua jenis pasifisme. Pertama, ada jenis pasifisme yang menolak untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan upaya mencapai perdamaian dalam konteks perang. Kedua adalah pasifisme yang menolak untuk menggunakan kekuatan militer untuk mencapai perdamaian.¹ Hal ini tercermin dalam identitas pasifis Jepang yang menekankan perdamaian, penolakan terhadap kekerasan, dan fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Identitas pasifisme Jepang juga tercermin dalam sikapnya terhadap konflik internasional dan kebijakan luar negeri yang menekankan diplomasi, kerja sama internasional, dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik.

¹ Muhammad Alfatih, 2019, *Remilitarisasi Jepang Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe Sebagai Tanggapan Terhadap Perkembangan Regional Asia Timur*, Diakses dari: <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9884/Cover - Bab1 - 3315074sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. (25/03/2023. 16.40)

Identitas ini telah menjadi ciri khas penting dalam hubungan internasional Jepang dan mempengaruhi berbagai aspek kebijakan luar negeri negara tersebut, terutama dalam segi keamanan dan pertahanan Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memulai membentuk kebijakan luar negeri yang berbentuk strategi yang mengacu pada pasifisme proaktif dimana kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang bertujuan untuk memperkuat pencegahan militer serta membentuk aliansi keamanan dengan negara-negara terkait. Abe menilai dengan adanya kebijakan ini dapat membantu Jepang mendapat pengakuan dan status yang positif di kalangan komunitas Internasional. Dalam kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe diharapkan Jepang dapat mampu merepresentasikan Identitas Pasifisme Proaktifnya dalam lingkungan global terutama pada kawasan Indo-Pasifik yang menjadi focus kawasan utamanya.

Free Open Indo-Pacific (FOIP) merupakan kebijakan luar Negeri yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada sesi pembukaan Konferensi Internasional Tokyo mengenai Pembangunan Afrika Keenam (TICAD VI) pada 27 Agustus 2016.² Abe berpendapat bahwa jika Jepang dan India dapat Bersatu dengan menggunakan cara ini maka Asia akan berkembang menjadi jaringan yang lebih luas mencakup keseluruhan Samudera Pasifik termasuk Amerika Serikat dan Australia. Pandangan Abe ini berdasar pada keamanan, ekonomi serta maritim di Kawasan Indo-Pasifik. Ketika istilah Indo-Pasifik ini diperkenalkan pertama kali, Kawasan ini langsung mendapatkan banyak perhatian

² Yuichi, Hosoya, 2019, *FOIP 2.0: The Evolution of Japan's Free and Open Indo-Pacific Strategy*, *Asia-Pacific Review*. 26, no. 1: 18–28. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/13439006.2019.1622868>

dikarenakan lokasinya yang terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kehadiran serta pengaruh negara-negara besar di Kawasan Indo-Pasifik seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Australia, Jepang serta negara-negara anggota ASEAN.³ Dinamika di Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu titik terpanas dari geopolitik global di Indo-Pasifik. Dalam Strategi FOIP Jepang ini telah memicu perdebatan yang luas tentang tatanan regional Indo-Pasifik. FOIP menggunakan konsep yang terbuka dan transparan sehingga memungkinkan orang, barang, modal hingga ilmu pengetahuan dapat mengalir dengan bebas. Komponen utama FOIP adalah keterbukaan, kebebasan Asia yang lebih luas dan kerja sama antara Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang.

FOIP sendiri berisi tentang strategi kompetitif dan kooperatif terhadap Tiongkok, yang bertujuan untuk meningkatkan tatanan internasional yang ada berdasarkan norma-norma aturan hukum internasional, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas. Terdapatnya dua arah yang bertentangan yaitu kompetitif dan kooperatif ini akan mengakibatkan Jepang sulit untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang. Namun Mataka Kamiya selaku peneliti di Hubungan Internasional khususnya di bidang keamanan berpendapat bahwa kedua arah kebijakan tersebut tidak selalu bertolak belakang, karena ini memungkinkan Jepang untuk tetap bekerja sama dengan Tiongkok tanpa harus menentang norma atau aturan internasional hukum yang telah berlaku serta masih dapat secara tegas

³Irawan, S, 2018, *Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Hendrajit* Vol, 1, No, 3, hal, 282-284, MANDALA: Jurnal Hubungan Internasional, DOI: <https://doi.org/10.33822/mjihi.v1i2.434>

mengejar tujuan strategisnya.⁴ David Scott dalam artikelnya untuk tinjauan Asia-Pasifik pada tahun 2012 bahwa “Praktek politik di Indo-Pasifik melibatkan kerangka kelembagaan dan operasi antar negara yang menyatukan kedua samudra, di mana kawasan maritim Indo-Pasifik sekarang sedang dibentuk melalui konseptualisasi kawasan dan strategi terkait untuk kemudian beroperasi di wilayah itu.

Dalam pembentukan Free Open Indo-Pasifik (FOIP) oleh Jepang terdapat Pro dan Kontra. Pro pembentukan FOIP Jepang adalah dari segi keamanan Regional, FOIP dapat membantu memperkuat keamanan regional di kawasan Indo-Pasifik. Dalam menghadapi ancaman maritim dan keamanan lainnya, FOIP dapat mendorong kerja sama yang lebih erat antara negara-negara di kawasan dan memperkuat kemitraan untuk menjaga stabilitas sesuai dengan Visi FOIP yaitu menciptakan kawasan Indo-Pasifik bebas dan Terbuka. Dalam kerja sama ekonomi, FOIP sebagai pendorong kerja sama ekonomi yang lebih kuat di kawasan Indo-Pasifik. Jepang, sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan tersebut, dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan integrasi ekonomi dan kemakmuran bersama di antara negara-negara tersebut.⁵

Kontra pembentukan FOIP adalah Potensi konfrontasi dengan Tiongkok. Geopolitik Indo-Pasifik berdampak langsung pada situasi energi dan keamanan Jepang. Akibatnya, karena Jepang bertujuan untuk meningkatkan keamanan

⁴ Kei Koga, 2020, *Japan's 'Indo-Pacific' Question: Countering Tiongkok or Shaping a New Regional Order?*, Vol, 96, No, 1: 49–73, *International Affairs*, DOI: <https://doi.org/10.1093/ia/iiz241>

⁵ Brahma Chellaney, 2018, *Japan's Pivotal Role in the Emerging Indo-Pacific Order*, *Asia-Pacific Review* 25, no. 1: 38–51. Diakses dari: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13439006.2018.1475714> (20/03/2023. 20.30 WIB)

energinya, Jepang juga berupaya untuk meningkatkan situasi keamanannya secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi peningkatan kehadiran ekonomi dan militer Tiongkok di wilayah tersebut. Ketika Tiongkok terus berkembang dan menggunakan pengaruh ekonomi dan geopolitik, Jepang khawatir pengaruh, status, dan keamanannya sendiri mungkin terancam. Oleh karena itu, Jepang mencoba mengimbangi pengaruh Tiongkok dengan secara aktif membangun hubungan dengan negara-negara lain di kawasan ini, berupaya menciptakan sekutu dan mitra, meningkatkan hubungan perdagangan energi, dan melakukan investasi besar dalam proyek infrastruktur kawasan.⁶ FOIP mencerminkan dinamika yang mendorong peningkatan ketegangan antara Jepang dan Tiongkok. Hal ini nantinya dapat memperburuk persaingan geopolitik di kawasan dan meningkatkan risiko konflik yang tidak diinginkan.

Dengan meningkatnya kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara eksportir saling berkompetisi untuk memasarkan produknya di kawasan tersebut. Persaingan itu tidak terbatas pada tingkat perdagangan internasional, namun juga pada investasi langsung ke sejumlah pasar di Indo-Pasifik untuk jaringan distribusi, industri manufaktur serta investasi pembangunan prasarana ekonomi seperti pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api, pembangkit listrik perbankan. Faktor keuntungan seperti inilah yang menjadi sebab negara investor besar seperti AS dan Tiongkok tertarik pada kawasan Indo-Pasifik. Kedatangan para aktor besar di kawasan Indo-Pasifik selain mendatangkan keuntungan dengan

⁶ Jeffrey Kucharski, B, 2020, *Japan, Foip, and the Geopolitics of Energy in the Indo-Pacific*. Diakses dari: https://sppga.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Kucharski_Japan-FOIP-Geopolitics-Indo-Pacific.pdf (20/05/2023. 20.19 WIB)

adanya peningkatan perekonomian, datang pula ancaman terhadap tatanan stabilitas keamanan pada kawasan ini. Saat ini isu keamanan terhadap stabilitas keamanan di perkirakan akan meningkat. Peningkatan isu keamanan ini dikarenakan oleh perebutan para aktor yang mempunyai kepentingan sendiri dan berkontensi akan mengganggu perdamaian di kawasan.⁷

Meningkatnya penggunaan Istilah “Indo-Pasifik” yang mengacu pada negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Pasifik lebih dari Asia-Pasifik membuat ketegangan pada dimensi maritim saat ini. Lautan Asia semakin menjadi arena untuk persaingan untuk sumber daya dan pengaruh masing-masing Negara.⁸ Salah satu Negara yang mempunyai kepedulian terhadap kawasan Indo-Pasifik adalah Jepang. Demi Kelangsungan hidup dan perkembangan Jepang, Indo pasifik yang bebas dan terbuka mutlak diperlukan. Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka adalah sebuah visi utama atau prinsip yang akan digunakan untuk kebijakan lainnya. Kawasan Indo-Pasifik mempunyai sejarah yang Panjang bagi Jepang, sejak zaman Meiji jalur laut dari India ke Timur Tengah sangat penting bagi Jepang. Kapal dagang Jepang telah terlibat dalam bisnis perdagangan dengan India dan Pakistan sejak lama. Inti dari visi Indo-pasifik sendiri bukan hanya mengenai Infrastruktur tetapi pembangunan hubungan yang saling percaya, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan kebebasan antar individu berdasarkan supremasi hukum.

⁷ Ibid.,

⁸ Shinichi Kitaoka, 2019, *Vision for a Free and Open Indo-Pacific*. Asia-Pacific Review 26, no. 1: 7–17, DOI: <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1618592>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti mengambil rumusan masalah dengan fokus **“Bagaimana Pengaruh Identitas Pasifisme Proaktif Jepang terhadap Pembentukan Kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang?”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan

- 1 Menjelaskan pengaruh identitas pasifisme proaktif Jepang terhadap pembentukan kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) sebagai kebijakan luar negeri-nya di Kawasan Indo-Pasifik
- 2 Bertujuan untuk menjelaskan perkembangan hubungan antar Negara di Kawasan Indo-Pasifik.
- 3 Menjelaskan proses pembentukan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan memberikan pengetahuan serta wawasan baru terhadap semua orang sehingga dapat menjadi rujukan dan inspirasi bagi penelitian yang akan datang terutama mereka yang ingin membahas mengenai teori konstruktivisme berbasis identitas terhadap kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan baru bagi kajian

hubungan internasional yang berkaitan dengan teori serta kebijakan yang diterapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konstruktivisme khususnya teori konstruktivisme identitas guna memperoleh alasan Jepang menerapkan kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP)?

B. Manfaat Praktis

Penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum secara langsung maupun tidak langsung penelitian ini memberikan pengetahuan bagi penulis. Bagaimana kebijakan suatu Negara dapat mempengaruhi stabilitas Negara nya sendiri dan Negara lain. Penelitian ini juga bertujuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga stabilitas keamanan suatu negara agar tidak mengganggu jalannya stabilitas Negara tersebut.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan tidak lah lepas dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Diperlukannya penelitian terdahulu untuk memperkuat data serta originalitas penelitian ini, penulis menggunakan beberapa dari penelitian terdahulu sesuai dengan tema yang penulis angkat, yaitu mengenai Pengaruh kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) Jepang terhadap keamanan maritim Indonesia.

Penelitian pertama adalah jurnal dari Yuichi Hosoya yang berjudul “**FOIP 2.0: The Evolution of Japan’s Free and Open Indo-Pacific Strategy**”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan konsep *literature review* dan pendekatan geopolitik. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses dan alasan

strategi FOIP Jepang berevolusi menjadi strategi yang bebas dan terbuka untuk Indo-Pasifik dan disebut dengan FOIP 2.0

Penulis disini menjelaskan bahwa salah satu masalah penting bagi FOIP Jepang adalah bahwa inisiatif diplomatic ini sering disalah artikan sebagai strategi Indo-Pasifik Amerika yang berpusat pada *Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD) yang terdiri dari Negara AS, Australia, Jepang dan India yang lebih mengarah ke orientasi militer. Persaingan geopolitik antara visi dari tatanan dunia yang bebas dan represif yang sedang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Penulis menyebutkan bahwa kesan dari kawasan Indo-Pasifik seakan terbagi menjadi dua kubu, yaitu FOIP aliansi AS-Jepang dan BRI (*Belt and Roan Initiative*) Tiongkok. Namun menurut pwnulis Pendekatan Jepang terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka lebih komperhensif, inklusif dan kooperatif daripadda AS. Penulis menyebutkan beberapa ahli yang mengkaji Tiongkok dan beberapa Negara di ASEAN menyampaikan keprihatinan mereka atas pembagian kawasan Indo-Pasifik di masa depan, lalu mengekcam FOIP sebagai alat untuk memecah belah kawasan. Dalam artikel ini FOIP 2.0 Jepang dengan hati-hati menghindari kesan bahwa Jepang dan AS bermaksud untuk menahan Tiongkok. Periode ketika Jepang mempromosikan inisiatif diplomatik ini sebagian besar tumpang tindih dengan waktu pemulihan hubungan Jepang-Tiongkok. Ketika pemerintahan Donald Trump mengintensifkan sikap konfrontatifnya terhadap Tiongkok seperti yang ditunjukkan

diNSS, Pendekatan administrasi Xi ke Tokyo menjadi lebih damai dari sebelumnya.⁹

Penelitian kedua yang digunakan adalah Jurnal dari Tomohiko Satake dan Ryo Sahashi yang berjudul *“The Rise of Tiongkok and Japan’s ‘Vision’ for Free and Open Indo-Pacific”*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari jurnal dan lembaga-lembaga terkait dianalisis menggunakan pendekatan teori *Regional Security Complex Theory* (RSCT), dan teori diplomasi pertahanan. Jurnal ini menganalisis mengenai visi FOIP Jepang yang berupaya mempertahankan tatanan regional yang terbuka dan inklusif dengan cara menggabungkan semua Negara di kawasan Indo-Pasifik ke dalam kerangka yang dibangun Bersama.

Visi yang dibawa Abe ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan konektivitas kawasan sehingga dapat berhasil mengantisipasi atau mempersiapkan kebangkitan Tiongkok di masa depan. Oleh karena itu Jepang telah mempercepat upayanya di bidang pertahanan, ekonomi, dan diplomasi demi membangun tatanan kawasan yang bebas dan terbuka dengan negara-negara lain yang mempunyai tujuan dan pikoiran yang seirama dengan Jepang. Jepang terus mendukung keunggulan AS di kawasan serta mempertahankan kebijakan keterlibatannya atas Tiongkok sebagai kelanjutan kebijakan luar negeri dan kemanannya Perang Dunia II. Jepang secara konsisten terus mendukung ketahanan serta konektivitas kawasan untuk

⁹ Yuichi Hosoya, 2019, *FOIP 2.0: The Evolution of Japan’s Free and Open Indo-Pacific Strategy*. *Asia-Pacific Review*. 26, no. 1: 18–28, DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/13439006.2019.1622868> 21: 18-28

menunjukkan dan mewujudkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan di kawasan khususnya di Indo-Pasifik.¹⁰

Penelitian ketiga adalah Jurnal Aurelio Insisa dan Giulio Pugliese yang berjudul “*The free and open Indo-Pacific versus the belt and road: spheres of influence and Sino-Japanese Relations*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustakan peristiwa terdahulu yang berkorelasi mengenai kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP), wawancara yang relevan. Jurnal ini menunjukkan bagaimana bahwa pencairan hubungan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok telah menimbulkan penyesuaian yang signifikan. Menunjukkan bagaimana di luar Asia Timur persaingan geoekonomi Jepang dan Tiongkok berlanjut di kawasan Asia Selatan. kembali Menggunakan konsep kepentingan nasional, stabilitas kawasan dan Geoekonomi.

Kebijakan FOIP ini didorong oleh kekuatan politik dan rasa yang saling tidak percaya dan inisiatif satu sama lain. Kemunculan kembali Tiongkok sebagai actor global serta kemajuannya di kawasan maritime terutama di kawasan Indo-Pasifik lalu penurunan relative Jepang menambah konsentrasi maritime dan teritorial di Laut Tiongkok Selatan semakin memperburuk suasana. Seiring berjalannya waktu hubungan Jepang dan Tiongkok mencair dan hingga menyarankan perubahan antara Jepang Tiongkok secara bertahap. dalam hubungan bilateral; khususnya, bahwa Tiongkok, mengingat konsolidasi kekuatan Xi dan

¹⁰ Tomohiko Satake and Ryo Sahashi, 2020, *The Rise of Tiongkok and Japan's ' Vision ' for Free and Open Indo-Pacific* *The Rise ofTiongkok and Japan ' s ' Vision ' for Free and Open Indo Pacific*, Journal of Contemporary Tiongkok 00, no. 00: 1–18, DOI:<https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1766907>.

tekanan balik AS, menurunkannya *Belt and Road Initiative* (BRI) yang sangat besar serta membuka diri untuk persaingan yang sehat.¹¹

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Ryo Sahashi yang berjudul ***“The Indo-Pacific in Japan’s Foreign Policy”***. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pengumpulan data melalui data sekunder dari kajian-kajian terdahulu khususnya peristiwa Pengenalan Indo-Pasifik oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) disebut sebagai tujuan kebijakan luar negeri Jepang. Banyak pengamat di dalam dan di luar Jepang menganggap FOIP sebagai upaya Tokyo untuk melawan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan geopolitik dan pendekatan kebijakan luar negeri.

Jepang sedang berusaha menghindari keterasingan politik yang serius dari Tiongkok. Tiongkok dan Jepang sedang dalam proses pemulihan diplomatic dari sejak musim semi tahun 2017. Kepentingan ekonomi Jepang saat ini bergantung pada regionalisasi politik di kawasan Indo-Pasifik yang mana visi FOIP akan terus berlanjut hingga dapat menekan inklusivitas Tiongkok serta menaungi pembuatan aturan kolektif dan patuh akan aturan dan norma Internasional.¹²

Penelitian kelima adalah jurnal Internasional dari Kei Koga yang berjudul ***“Japan’s ‘Indo-Pacific’ question: countering Tiongkok or shaping a new***

¹¹ Aurelio Insisa and Giulio Pugliese, 2020, *The Free and Open Indo-Pacific versus the Belt and Road : Spheres of Influence and Sino-Japanese Relations,* *The Pacific Review* 0, no. 0: 1–29, DOI: <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1862899>.

¹² Sahashi and Michael Green, 2019, *The Indo-Pacific in Japan’s Foreign Policy*, no. January: 1–11. Ryo. Diakses dari: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/FINAL_Working%20Paper_Ryo%20Sahashi.pdf. (27/04/2023. 18.20 WIB)

regional order?” Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta pendekatan yang digunakan adalah *balance of power theory* (teori keseimbangan kekuatan) dan *National Interest* (Kepentingan Nasional). Kei berpendapat bahwa tujuan utama dari FOIP adalah untuk membentuk dan mengkonsolidasikan tatanan regional di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan aturan yang telah ada. Konsep ini awalnya disetujui untuk mencapai dua tujuan yang berbeda namun seiring berjalannya waktu, Jepang memperlihatkan fokus strategi yang pertama saja yaitu kooperatif dipandang kompetitif. Di satu sisi, sebagai keseluruhan strategi keamanannya, Jepang bertekad untuk terus meningkatkan pertahanan nasional dengan meningkatkan kemampuannya sendiri dan memperkuat aliansi AS- Jepang, sementara itu juga mengubah kemitraannya dengan negara-negara yang berpikiran sama, seperti Australia dan India, menjadi keselarasan diplomatic. Kebijakan dari keamanan nasional Jepang dan konsep FOIP saling melengkapi satu sama lain tetapi pada dasarnya berbeda. Jepang terlibat dalam penyeimbangan internal dan eksternal melawan Tiongkok untuk melindungi kepentingan vital nasionalnya, khususnya kedaulatan negara dan integritas teritorial. Sejak 2012, Jepang telah meningkatkan anggaran pertahanannya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, khususnya di arena udara dan maritim, dan selanjutnya melembagakan aliansi AS-Jepang untuk mengelola situasi 'zona abu-abu' regional serta kemungkinan yang lebih akut. melalui cara seperti pedoman pertahanan AS-Jepang 2015.¹³

¹³ Kei Koga, 2020, *Japan's 'Indo-Pacific' Question: Countering Tiongkok or Shaping a New Regional Order?*, Vol, 96, No, 1: 49–73, *International Affairs*, DOI: <https://doi.org/10.1093/ia/iiz241>

Penelitian Keenam adalah. Jurnal Internasional dari Jeffrey B. Kucharski seorang professor dari *University Victoria Canada*. Jurnal ini terbit pada April 2020 yang berjudul: “*Japan, FOIP, And the Geopolitics of Energy in The Indo-Pacific.*” Penelitain dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan isu besar yang dibahas adalah Jepang yang memberlakukan kebijakan energi dan keamanan di Indo-Pasifik dalam upaya menanggapi situasi geopolitik yang berkembang di kawasan tersebut. Kemanan energi selalu membayangi seluruh prioritas kebijakan untuk Jepang, kerangka kebijakan energi yang jauh lebih strategis dan kuat menjadi sebuah keharusan untuk mengubah sistem energi Jepang dan lebih menekankan aspek keamanan dari kebijakan keamanan energinya.

Sejumlah perkembangan geopolitik, termasuk kerjasama Tiongkok dan Rusia pada pipa gas alam Power of Siberia, komponen energi BRI, dan kecemasan umum atas ketidakstabilan di Timur Tengah, kemungkinan berada di belakang langkah Jepang dan AS untuk menggunakan sumber daya diplomatik, keuangan, dan energi mereka untuk melawan perkembangan ini. Pada November 2017, Amerika Serikat meluncurkan dua prakarsa kerja sama energi besar: Kemitraan Energi Strategis Jepang–Amerika Serikat (JUSEP) dan Kemitraan dalam Keamanan Energi antara Washington dan Seoul. Kesepakatan ini difokuskan pada peningkatan ketahanan energi serta kerja sama dalam investasi infrastruktur energi di wilayah tersebut. Bersama-sama perkembangan ini telah digambarkan sebagai langkah pertama menuju strategi “keamanan energi bersekutu” yang menghubungkan kerja sama keamanan energi dengan pengembangan infrastruktur

berkualitas tinggi di negara ketiga sambil membantu meningkatkan permintaan LNG dalam pembangkit listrik.¹⁴

Penelitian Ketujuh sekaligus menjadi penelitian terakhir adalah penelitian dari Shinichi Kitaoka yang berjudul “*Vision for a Free and Open Indo-Pacific*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsif yaitu mendeskripsikan visi untuk Indo-Pasifik bebas dan terbuka yang terbagi menjadi beberapa poin. Menurut Kitaoka Visi Jepang dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka bukanlah sebuah strategi. Strategi sendiri menurutnya adalah metode yang digunakan untuk mewujudkan tujuan ke tingkat yang lebih tinggi dan merupakan sistem berbasis kebijakan. Sebaliknya, “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” adalah visi utama atau prinsip panduan untuk kebijakan lainnya. Baru-baru ini, pemerintah merujuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sebagai sebuah “visi”, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa ini untuk menghilangkan implikasi militer yang melekat pada istilah strategi. Namun, ia percaya bahwa penggunaan istilah visi itu akurat.

Demi kelangsungan hidup dan perkembangan Jepang, Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka mutlak diperlukan. Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat akan bertahan meskipun Indo-Pasifik tidak menjadi bebas atau terbuka. Itu berlaku juga untuk Inggris, Prancis, dan Jerman. Namun bagi Jepang, ini adalah tugas yang sangat penting bagi keberlangsungan Jepang baik dari segi ekonomi dan geopolitiknya.

¹⁴ Kucharski, Jeffrey B, 2020, *Japan, Foip, and the Geopolitics of Energy in the Indo-Pacific*. Diakses dari: https://sppga.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Kucharski_Japan-FOIP-Geopolitics-Indo-Pacific.pdf (20/05/2023. 20.19 WIB)

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Metodologi dan Alat Analisa	Hasil
1.	Yuichi Hosoya “ <i>FOIP 2.0: The Evolution of Japan’s Free and Open Indo-Pacific Strategy</i> ”.	Metodologi: Deskriptif Alat Analisa: konsep geopolitik	Kawasan Indo-Pasifik terbagi menjadi dua kubu, yaitu FOIP aliansi AS-Jepang dan BRI Tiongkok. Namun, pendekatan Jepang terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka lebih komprehensif, lebih inklusif, dan lebih kooperatif daripada yang telah tertulis di <i>National security strategy</i> (NSS) dari AS. Jepang mempromosikan inisiatif diplomatik ini sebagian besar tumpang tindih dengan waktu pemulihan hubungan Jepang-Tiongkok. Ketika pemerintahan Donald Trump

			<p>mengintensifkan sikap konfrontatifnya terhadap Tiongkok seperti yang ditunjukkan di NSS, Pendekatan administrasi Xi ke Tokyo menjadi lebih damai dari sebelumnya.</p>
2.	<p>Tomohiko Satake dan Ryo Sahashi yang berjudul “<i>The Rise of Tiongkok and Japan’s ‘Vision’ for Free and Open Indo-Pacific</i>”</p>	<p>Metodologi: Deskriptif Pendekatan teori Regional Security Complex Theory (RSCT), teori diplomasi pertahanan</p>	<p>Peneliti berbeda pandangan dengan khalayak umum bahwa FOIP melambangkan sikap penahanan Jepang terhadap Tiongkok di bawah pemerintahan Abe, visi FOIP Jepang bertujuan mempertahankan tatanan regional yang terbuka dan inklusif yang menggabungkan semua negara kawasan ke dalam kerangka kerja bersama. Daripada secara langsung menargetkan negara tertentu atau mengecualikannya, ini bertujuan untuk memperkuat</p>

			ketahanan dan konektivitas kawasan sehingga berhasil mengakomodasi kebangkitan Cina di masa depan. Untuk itu, Jepang telah mempercepat upayanya di bidang pertahanan, ekonomi, dan diplomasi untuk membangun tatanan kawasan yang bebas dan terbuka dengan negara-negara lain yang berpikiran sama.
3.	Aurelio Insisa dan Giulio Pugliese yang berjudul <i>“The free and open Indo-Pacific versus the belt and road: spheres of influence and Sino-Japanese Relations”</i>	Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustakan dan wawancara. Alat Analisa: teori Geopolitik	Keterlibatan Sino-Jepang di Indo-Pasifik melalui prisma lingkup pengaruh. Kami menemukan bahwa kalkulasi keamanan dan politik berjalan jauh di bawah prakarsa konektivitas, seperti yang terlihat dari kualifikasi pejabat Jepang terhadap BRI dalam hal kemajuan Tiongkok ke laut dan kekhawatiran bahwa keterlibatan ekonomi Tiongkok

			di kawasan Indo-Pasifik akan diterjemahkan ke dalam lingkup Tiongkok yang lebih luas pengaruh baik secara geopolitik maupun politik. Geopolitik
4.	Ryo Sahashi “ <i>The Indo-Pacific in Japan’s Foreign Policy</i> ”	Metodologi: Deskriptif Alat Analisa: Teori <i>Foreign Policy Decision Making</i>	Konsep FOIP berguna sebagai sarana bagi Jepang, Amerika Serikat, dan negara lainnya untuk mengidentifikasi bidang kerja sama yang dapat mendukung keamanan dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Sifat ketidaktepatan FOIP, sebagaimana dibuktikan oleh perubahan formulasi Jepang dari waktu ke waktu, bisa dibilang menarik dalam hal mengembangkan konsensus tentang pentingnya keterbukaan dan inklusivitas dalam diplomasi regional, tetapi juga menantang 3.

			Sehubungan dengan membuat pendekatan bersama untuk mengelola kebangkitan dari Cina. Saat ini, FOIP bukanlah strategi daripada kerangka kerja untuk mengeksplorasi kebijakan regional tetapi berpotensi menjadi landasan koordinasi aliansi AS-Jepang di masa depan.
5.	<p><i>Japan's 'Indo-Pacific question: countering Tiongkok or shaping a new regional order? *</i></p> <p>Oleh: Kei Koga</p>	<p>Metodologi: Deskriptif kualitatif</p> <p>Alat Analisa: <i>balance of power theory</i> (teori keseimbangan kekuatan) dan <i>National Interest</i> (Kepentingan Nasional)</p>	<p>Tujuan utama dari FOIP adalah untuk membentuk dan mengkonsolidasikan tatanan regional di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan aturan yang telah ada. Konsep ini awalnya disetujui untuk mencapai dua tujuan yang berbeda namun seiring berjalannya waktu, Jepang memperlihatkan focus strategi yang pertama saja yaitu kooperatif dipandang</p>

			<p>kompetitif. Di satu sisi, sebagai keseluruhan strategi keamanannya, Jepang bertekad untuk terus meningkatkan pertahanan nasional dengan meningkatkan kemampuannya sendiri dan memperkuat aliansi AS- Jepang, sementara juga mengubah kemitraannya dengan negara-negara yang berpikiran sama, seperti Australia dan India, menjadi keselarasan diplomatik, dan berpotensi militer.</p>
6.	<p><i>Japan, FOIP, and the Geopolitics of Energy in the Indo-Pacific</i></p> <p>Oleh: Jeffrey B. Kucharski</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif dengan konsep Geopolitik Energi</p>	<p>Sebagai negara demokrasi parlementer dan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang memainkan peran penting sebagai pembela tatanan liberal, multilateral, berbasis aturan di Indo-Pasifik. Karena pengaruh ekonomi dan militer Tiongkok di kawasan ini telah</p>

			<p>berkembang selama beberapa tahun terakhir, Jepang telah menanggapi dengan mengerahkan tingkat kepemimpinan yang jauh lebih besar pada sejumlah masalah yang menjadi perhatian di kawasan tersebut. Ini termasuk keamanan tradisional dan manusia, energi, mitigasi perubahan iklim, dan bantuan pembangunan internasional.</p> <p>Sehubungan dengan energi, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan adalah importir minyak mentah terbesar di dunia, dan semuanya kecuali Tiongkok bergantung pada impor untuk 80 persen atau lebih dari kebutuhan mereka. Jepang khususnya bergantung pada pengiriman minyak, gas alam, dan produk energi</p>
--	--	--	--

			lainnya melalui laut untuk semua kebutuhan bahan bakar fosilnya.
7.	<p><i>Vision for a Free and Open Indo-Pacific</i></p> <p>Oleh: Shinichi Kitaoka</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif menggunakan konsep National Interest</p>	<p>Jepang adalah contoh modernisasi pertama dan terbaik dari latar belakang non-Barat. Itu juga merupakan negara paling sukses di Official Development Assistance ODA. Negara-negara Asia Timur yang bekerja sama dengan Jepang pada 1950-an berada pada tingkat ekonomi yang hampir sama dengan Afrika sub-Sahara; namun, bila dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang didukung oleh Barat, negara-negara Asia Timur menjadi sangat maju.</p>

1.5 Kerangka teori

1.5.1 Teori Konstruktivisme Identitas

Dalam buku Teori Hubungan Internasional karya Mohamad Rosyidin, teori konstruktivisme berbasis identitas digambarkan sebagai teori yang memiliki definisi actor terhadap dirinya sendiri, identitas sangat penting bagi aktor Negara karena berkaitan dengan cara negara mendefinisikan identitas itu sendiri yang berdampak dengan kepentingan negara. Identitas akan menentukan kepentingan dan kepentingan akan menentukan tindakan. Jika Tindakan negara tersebut konsisten maka identitas tersebut akan semakin kuat. Namun sebaliknya jika Tindakan actor negara banyak bertolak belakang dan menyimpang dari identitas negara maka identitas tersebut akan berubah atau bisa saja hilang.¹⁵

Salah satu tokoh bersejarah yang berkontribusi pada teori Konstruktivisme adalah Alexander Wendt. Menurut Wendt Konstruktivisme adalah kerangka teori yang menekankan peran gagasan, norma, dan konstruksi sosial dalam membentuk hubungan internasional. Karya Wendt tentang konstruktivisme menantang perspektif realis dan liberal yang dominan dalam hubungan internasional. Beliau berpendapat bahwa perilaku negara dan struktur sistem internasional tidak semata-mata ditentukan oleh faktor material seperti kekuasaan atau kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh gagasan dan norma sosial bersama. Negara adalah aktor sosial yang

¹⁵ Mohamad Rasyidin & Yahya, Muhammad (ed), 2015, *The Power of ideas: konstruktivisme dalam studi hubungan internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

tertanam dalam konteks sosial yang lebih besar, dan perilaku mereka dipengaruhi oleh persepsi, identitas, dan makna yang mereka lekatkan pada interaksi mereka.¹⁶

Alexander Wendt memberikan definisi dari identitas sebagai “atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan. Artinya, identitas dapat membentuk kepentingan aktor baik seseorang maupun negara, yang kemudian kepentingan itu membentuk tindakan yang secara tidak langsung juga akan membentuk identitas. Baik identitas yang sama atau berubah menjadi identitas baru. Alexander Wendt juga membagi empat jenis identitas dalam hubungan internasional. Pertama adalah identitas personal dimana identitas suatu aktor terbentuk secara alamiah seperti contohnya bentuk fisik, lambang negara, nasionalisme dan lain-lain. Identitas kedua adalah identitas tipe yang dipengaruhi oleh kategori tertentu seperti ideologi politik atau agama. Identitas ketiga adalah identitas peran yang memfokuskan kedudukan atau posisi aktor dalam hubungan internasional. Identitas ini baru bisa terbentuk apabila aktor yang bersangkutan melakukan suatu aktivitas hubungan internasional dengan aktor lain dan mendapat tanggapan. Wendt menekankan bahwa “*Actors use ideas to construct relationships and material reality, so ideas precede negotiations and interpret history to make relationships either conflictual or cooperative*” Menurut Wendt, struktur dan sistem sosial mengandung 3 elemen, yaitu kondisi material, kepentingan dan ide-

¹⁶ Fitri K. Margareth, Mohammad Rosyid, 2017, Identitas Dalam Hubungan Internasional: Dilema Kebijakan Luar Negeri Finlandia Dalam Krisis Ukraina 2014, *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 2: 213. DOI: <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i4.17537>

ide. Signifikansi dari kondisi material ditentukan oleh kepentingan. Sedangkan kepentingan akan ditentukan oleh ide-ide.¹⁷

Menurut teori ini identitas bukanlah suatu entitas yang tetap dan baku, tetapi sesuatu yang dibangun melalui interaksi sosial yang dipengaruhi oleh norma yang ada dalam lingkungan politik. Identitas dapat berubah seiring waktu melalui interaksi sosial dan pergeseran dalam norma dan nilai-nilai yang dianut oleh aktor-aktor politik. Perubahan identitas dapat mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara. Dalam teori konstruktivisme identitas, identitas dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam menganalisis hubungan internasional. Perubahan identitas dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku negara serta membentuk dinamika dalam politik internasional. Teori ini menekankan pentingnya memahami konstruksi identitas dalam menganalisis konflik, kerja sama, dan dinamika kekuasaan antara aktor-aktor politik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang memusatkan perhatian kepada mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, Objek telaahan penelitian eksplanasi (explanatory research) adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antar-variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini, tentu ada hipotesis yang

¹⁷ M.Si Iva Rachmawati, 2018, Konstruktivisme Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Hubungan Internasional, *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 16, no. 1, Diakses dari <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2456>. (05/06/2023. 21.00 WIB)

akan diuji kebenarannya.¹⁸ Dalam hal ini penulis berfokus pada mengapa Jepang menerapkan Kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP)? Penulis mengumpulkan data atau informasi secara lengkap-lengkapnyanya agar dapat memahami secara kompleks fenomena tersebut secara utuh dan dapat menjawab permasalahan tersebut secara detail dan rinci.

1.6.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan penulis kali ini ada dua variabel, yaitu Independen dan dependen. Variabel Independen adalah variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari variabel lain, variabel ini merupakan penyebab atau faktor yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Variabel dependen adalah variabel yang bergantung pada variabel penelitian dan merupakan variabel yang diukur dan diamati dalam suatu penelitian. Variabel independent pada penelitian ini adalah Identitas Jepang sedangkan variabel dependennya adalah Inisiasi *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang.

1.6.3 Level Analisa

Kenneth Waltz mempelopori penerapan tingkat Analisa sebagai kerangka berpikir dalam bukunya dan mengidentifikasi tiga tingkat analisis, yaitu: Individu, negara dan sistem Internasional. J.David Singer menekankan tingkat Analisa negara dan system Internasional sebagai yang paling efektif untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena internasional.¹⁹ Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan level analisis Negara. Dalam hal Identitas

¹⁸ Ulber Silalahi dan Aep Gunarsa, 2009, *Metode penelitian sosial / Ulber Silalahi; editor, Aep Gunarsa*, Bandung, Refika Aditama.

¹⁹ Mohtar Mas'oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LPES

Jepang sebagai negara pasifisme dapat mempengaruhi pemberlakuan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang.

1.6.4 Teknik Analisa

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Yang berusaha memahami dan menafsirkan makna dari satu peristiwa atau fenomena. Sehingga penulis disini mengumpulkan data-data (data kualitatif) yang dapat mendukung penelitian ini untuk dijadikan data pendukung akan konsep yang digunakan untuk menjelaskan alasan pemberlakuan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *library research*. Pengumpulan data *library research* adalah studi pustaka berupa buku, skripsi, jurnal nasional dan internasional, serta artikel dari berita resmi di media *online* agar dapat mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat kemudian disesuaikan dengan sistematika penulisan yang telah diatur.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Batasan Materi

Agar Pembahasan dari Penelitian ini lebih Fokus maka peneliti memiliki batasan-batasan Penelitian yaitu pada Pengaruh identitas pasifisme proaktif Jepang terhadap pembentukan kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) oleh Jepang.

1.7.2 Batasan Waktu

Penelitian mengenai pembentukan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) dimulai sejak Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan keikutsertaannya dalam pembentukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Abe mengumumkan Visi Misinya mengenai Indo-pasifik yang bebas dan stabil pada sesi pembukaan Konferensi Internasional Tokyo mengenai Pembangunan Afrika Keenam (TICAD VI) pada 27 Agustus 2016. Oleh karena itu peneliti mengambil batasan waktu pada tahun 2016-2023. Pemerintah Jepang mengeluarkan inisiasi Rencana baru untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka pada Maret 2023 dengan tujuan dan konsep dasar konsep FOIP sebagai panduan perspektif untuk dibagikan oleh komunitas internasional pada titik balik sejarah. Memperkuat upaya mewujudkan FOIP. Secara khusus, menggabungkan elemen-elemen baru untuk menangani masalah perdamaian dan milik bersama global (seperti iklim dan lingkungan, kesehatan global, dan dunia maya) ke dalam kerja sama untuk FOIP. Juga, mengambil tindakan lebih lanjut di bidang-bidang seperti konektivitas dan kebebasan laut yang telah menjadi fokus FOIP.²⁰

1.8 Hipotesa

Kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) Jepang ini timbul atas Identitas Jepang sebagai Negara pasifisme dimana Negara yang kebijakan atau pandangannya menentang penggunaan kekerasan dan upaya militer untuk mencapai tujuan politik. Jepang mengadopsi pasifisme setelah kekalahan mereka

²⁰ Ministry of Foreign of Affairs, 2023, New Plan for a ‘ Free and Open Indo-Pacific (FOIP), diakses dari https://www.mofa.go.jp/fp/pc/page3e_001336.html (07/04/2023, 21.28 WIB)

dalam Perang Dunia II dan melalui Pasal 9 Konstitusi Jepang yang disahkan pada tahun 1947. Dalam teori konstruktivisme sebuah negara harus memiliki identitas, Identitas akan menentukan kepentingan dan kepentingan akan menentukan tindakan. Sebagai negara yang menganut identitas pasifisme proaktif, Jepang mempunyai kepentingan untuk menentang penggunaan kekerasan dalam hal ini di kawasan Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas dan terbuka bagi siapapun. Dengan adanya kepentingan ini Jepang membuat kebijakan *Free Open Indo-Pacific* (FOIP)

1.9 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

<p>BAB I</p> <p>PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Belakang</p> <p>1.2 Latar Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.2.1 Manfaat Akademis</p> <p>1.3.2.2 Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Teori dan Konsep</p> <p>1.5.1 Teori Konstruktivisme Identitas</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p>
---	--

	<p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Variabel Penelitian</p> <p>1.6.3 Level Analisa</p> <p>1.6.4 Teknik Analisa</p> <p>1.6.5 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.7.1 Batasan Waktu</p> <p>1.7.2 Batasan Materi</p> <p>1.8 Argumen Pokok</p>
<p>BAB II</p> <p>RESPON JEPANG</p> <p>TERHADAP</p> <p>KONTESTASI POLITIK</p> <p>DI KAWASAN INDO-</p> <p>PASIFIK</p>	<p>2.1 Konstentasi Politik di Kawasan Indo-Pasifik</p> <p>2.2 Posisi politik Jepang di Kawasan Indo-Pasifik.</p> <p>2.2.1 Arti penting Kawasan Indo-Pasifik bagi Jepang</p> <p>2.2.2 Kebijakan Jepang di Kawasan Indo-Pasifik</p> <p>2.3 Kebijakan Free Open Indo-Pacific Sebagai kebijakan Jepang di Kawasan Indo-Pasifik</p> <p>2.3.1 Proses Pembentukan Free Open Indo-Pacific (FOIP) oleh Jepang</p> <p>2.3.2 Implementasi Kebijakan Free Open Indo-Pacific di Kawasan Indo-Pasifik</p>

<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">ANALISIS SEBAB DARI PEMBERLAKUAN FREE OPEN INDO-PACIFIC OLEH JEPANG</p>	<p>3.1 Identitas Pasifisme Proaktif Jepang di Kawasan Indo-Pasifik</p> <p>3.2 Identitas Pasifisme Proaktif Personal dan Sosial Jepang di Kawasan Indo-Pasifik</p> <p>3.3 Kepentingan Jepang dibalik Pembentukan Free Open Indo-Pacific (FOIP)</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENUTUP</p>	<p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

